

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya, yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itulah orientasi pembangunan harus selalu mengacu kepada pembentukan sumber daya manusia yang terampil.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan adanya kebijaksanaan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang wajib belajar Pendidikan 9 tahun. Kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Nasional adalah mencanangkan wajib belajar 9 tahun belajar untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dengan ini juga merupakan sasaran utama pembangunan jangka panjang.

Pendidikan dilaksanakan untuk mengejar berbagai ketinggalan, memajukan serta meningkatkan taraf hidup seluruh bangsa Indonesia. Jika diperhatikan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah baik dalam wawasan keterampilan maupun pendapatan material sehari-hari. Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui pendidikan dasar 9 tahun yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik kesejahteraan mental intelektual (sikap,wawasan dan kemampuan berusaha) maupun fisik dan material.

Dalam perspektif demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk di Indonesia, termasuk melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Meskipun masih ditemukan berbagai masalah, pembangunan pendidikan telah membuahkan hasil yang relative baik seperti tercermin pada meningkatnya rata-rata lama sekolah dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas, serta peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di setiap jenjang pendidikan dan angka partisipasi sekolah (APS) pada semua kelompok umur anak-anak usia sekolah (Indraharti, 2005).

Dalam rangka memperluas akses pendidikan, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal, namun meningkatnya partisipasi pendidikan masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti masih banyaknya anak-anak usia sekolah, terutama dari kelompok miskin yang tidak dapat memperoleh pelayanan pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan bagi mereka.

Upaya peningkatan partisipasi dalam pendidikan masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti banyaknya gedung sekolah yang rusak. Sehingga pemerintah perlu melakukan pengalokasian dana alokasi khusus untuk bidang pendidikan.

Pendidikan dilaksanakan untuk mengejar berbagai ketinggalan, memajukan serta meningkatkan taraf hidup seluruh Bangsa Indonesia. Jika diperhatikan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah baik dalam wawasan keterampilan maupun pendapatan material sehari-hari. Keadaan ini menunjukkan

bahwa kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui Pendidikan Dasar 9 tahun yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik kesejahteraan mental intelektual (sikap, wawasan dan kemampuan berusaha) maupun fisik dan material.

Pendidikan memberi manfaat ganda dalam konteks sosial dan ekonomi. Di satu pihak, pendidikan telah melahirkan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk lapisan kelas menengah, yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat sejahtera. Pendidikan juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kehidupan yang harmoni dan toleran dalam kemajemukan, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan memantapkan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Di lain pihak, pendidikan secara nyata memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja berpendidikan, menguasai teknologi, dan mempunyai keahlian dan keterampilan.

Dalam perspektif demikian, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia, termasuk melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2008. Meskipun masih ditemukan berbagai masalah, pembangunan pendidikan telah membuahkan hasil yang relatif baik seperti tercermin pada meningkatnya rata-rata lama sekolah dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, serta peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di setiap jenjang pendidikan dan angka partisipasi sekolah (APS) pada semua kelompok umur anak-anak usia sekolah. Dalam rangka memperluas akses pendidikan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok

masyarakat diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal. Namun, meningkatnya partisipasi pendidikan masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti masih banyaknya anak-anak usia sekolah, terutama dari kelompok miskin yang tidak dapat memperoleh pelayanan pendidikan karena mahal biaya pendidikan bagi mereka. Untuk itu, mulai tahun ajaran 2005/2006 telah disediakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun yang dimaksudkan untuk dapat membebaskan anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga miskin, dari semua bentuk iuran.

Pencapaian lain juga terlihat dalam hal kemampuan keberaksaraan penduduk Indonesia, yang terus meningkat seperti tercermin pada meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun menjadi 90,38 persen pada tahun 2004. Perbaikan tingkat keberaksaraan ini terutama terjadi pada kelompok usia muda yaitu usia 15–24 tahun, seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan meningkatnya proporsi siswa Sekolah dasar/madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yang dapat menyelesaikan pendidikannya. Patut disyukuri, tingkat keberaksaraan kelompok penduduk usia muda (15–24) sudah sangat tinggi yaitu dengan angka melek aksara sebesar 98,71 persen. Pada kelompok tersebut kesenjangan antara penduduk perkotaan dan perdesaan serta antar jenis kelamin juga tidak tampak nyata. Namun demikian, jika rentang usia diperluas menjadi 15 tahun ke atas, tampak bahwa angka buta aksara masih cukup tinggi yaitu sebesar 9,62 % pada tahun 2004 (BPS, 2000).

Masalah utama pendidikan di Indonesia masih rendahnya persentase siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi khususnya dari SMP ke

SMA. Lulusan SD yang melanjutkan ke SMP baru sekitar 80%, sisanya sekitar 20% atau 15.000 orang tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau putus sekolah. Anak-anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK mencapai 40%. Andaikan jumlahnya sama dengan lulusan SD, berarti kurang lebih 30.000 orang. Belum lagi angka lulusan SMA tidak melanjutkan ke PT mencapai 60-70 persen. (Indraharti. 2005 : 3)

Meskipun angka partisipasi sekolah terus meningkat, namun masih terdapat sejumlah siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah. Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menetapkan bahwa penuntasan wajib belajar 9 tahun harus tercapai selambat-lambatnya tahun 2008/2009. Tolak ukur untuk ketuntasan tersebut ditetapkan bahwa pada tahun 2008/2009 minimal APK SMP mencapai 95% secara nasional. (Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah)

Dalam usaha penuntasan wajib belajar 9 tahun, berbagai usaha telah dilakukan antara lain dengan mengembangkan pendidikan alternative. Dengan pola wajib belajar yang ada saat ini ternyata masih ada tamatan SD/MI yang tidak tertampung karena mereka yang berada di daerah-daerah yang terisolir, terpencil, dan terpencar. Pola wajib belajar saat ini adalah SMP Reguler, SMP Terpadu, SMP Terbuka, Mts, Kejar Paket B, dan Pondok Pesantren.

Salah satu usaha untuk mengembangkan pendidikan dalam penuntasan Wajib Belajar 9 tahun yaitu dengan dibangunnya SD-SMP SATU ATAP dimana SMP di buka di SD yang memiliki lulusan dan belum tertampung dengan memanfaatkan sarana yang telah ada atau dengan melengkapi yang belum ada agar SMPnya dapat operasional.

Tujuan dilaksanakannya Sekolah Satu Atap dilihat dari segi penyusunan pedoman, tujuannya adalah untuk memberikan acuan bagi pengelola SD-SMP Satu Atap agar dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan SD-SMP Satu Atap dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dilihat dari kebijakan pemerintah, tujuan pengembangan SD-SMP Satu Atap adalah untuk menyediakan layanan pendidikan di daerah terpencil, terisolir, dan terpencar-pencar dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Mendekatkan SMP dengan SD pendukungnya sehingga anak yang semula tak memiliki kesempatan melanjutkan mendapat peluang untuk melanjutkan. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pedoman penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap mencakup langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sedangkan substitusi yang dikelola menyangkut kelembagaan, kurikulum, siswa, tenaga, sarana, prasarana, kegiatan belajar mengajar, keuangan, dan pelaporan.

Sekolah Satu Atap dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, adapun kekurangan dari sekolah satu atap ini adalah tidak banyaknya tenaga pengajar dan kurangnya fasilitas untuk pembelajaran. Informasi-informasi tentang pendidikan sangat terlambat di Sekolah Satu Atap di Desa Dolok Saut dikarenakan tempat yang sangat terpencil.

Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Propinsi melalui Satker Peningkatan Mutu SMP (Dekonsentrasi) dan Pemerintah Pusat. Dinas Pendidikan Propinsi menyelenggarakan kegiatan yang dibantu oleh fasilitator sarpras dan fasilitator pendidikan akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

melalui Tim Teknis Kabupaten/Kota (TTK) untuk membantu dan memfasilitasi Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap dalam melaksanakan program block grant Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap.

Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap didasarkan pada tiga prinsip :

- (1) Mengoktimalkan disentralisasi pendidikan, (2) Transparansi dan akuntabilitas, (3) Memberdayakan masyarakat,

Hasil yang diharapkan dalam pengembangan SD-SMP Satu Atap :

- (1) Berkembangnya Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap secara bertahap, (2) Terpenuhinya Pelayanan Pendidikan Dasar bagi anak-anak daerah terpencil, terisolir, dan terpencar, (3) Meningkatnya mutu pendidikan SD dan kesiapan menempuh pendidikan SMP.

Tapanuli Utara adalah salah satu Kabupaten yang memiliki sekolah satu atap. Di daerah ini di temukan 3 unit Sekolah Satu Atap yang terdapat di Desa Simangumban Jae, desa Simangumban Julu, dan desa Dolok Saut, ketiga desa terdapat di Kecamatan Simangumban. Umumnya sekolah satu atap ini dibangun pada desa-desa terpencil dan terisolir. Pada tahun 2007 dibangunlah Sekolah Satu Atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara. Desa Dolok Saut merupakan Desa yang terdapat di kecamatan Simangumban dimana Simangumban salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara yang beribukotakan Tarutung. Luas Wilayah Kecamatan Simangumban 150 Km², Kecamatan ini terdiri dari 8 Desa yaitu : (1). Desa Silosung, (2). Desa Simangumban Jae, (3). Desa Dolok Sanggul, (4). Desa Aek Nabara, (5). Desa Simangumban Julu, (6). Desa Lobu Sihim, (7). Desa Dolok Saut, (8). Desa Pardomuan. (BPS, 2010)

Di Desa Dolok Saut persentase penduduk yang sekolah menurut kelompok umur usia 7-15 tahun, pada tahun 2007-2008 sebanyak 61,7 %, pada tahun 2008-2009 menurun 13,1% menjadi sebanyak 48,6 %, dan pada tahun 2010-2011 adanya peningkatan sebanyak 18,5% menjadi sebanyak 67,1 %.

Jumlah daya tampung Sekolah Satu Atap minimal 30 siswa/i, tetapi Sekolah Satu Atap Di Desa Dolok Saut lebih dari 30 siswa/i yang mendaftar, biasanya jumlah siswa yang mendaftar untuk ke Sekolah Dasar sebanyak 45 siswa/i, sedangkan untuk tingkat SMP kebanyakan tamatan dari SD Satu Atap tersebut.

Siswa yang bersekolah di Sekolah Satu Atap yang terdapat di Desa Dolok Saut tersebut berasal dari Desa Dolok Saut tersebut, Desa-desanya yang terdekat dengan Desa Dolok Saut seperti Desa Pardomuan, Desa Dolok Sanggul dan Desa Lobusihim, dimana mereka lebih banyak bersekolah di jenjang SMP, dikarenakan tidak adanya SMP yang ada di Desa masing-masing.

Untuk itu perlu diperhatikan dan diperhitungkan usaha yang tepat dan lengkap dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan dalam pembangunan, dan untuk mewujudkan bahwa partisipasi pendidikan bukanlah hal yang disepelekan tetapi merupakan sesuatu yang berarti bagi kehidupan keluarga, kehidupan bangsa dan negara. Demikian pentingnya pendidikan dengan segala programnya dalam rangka Pembangunan Nasional, sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa pembangunan dapat berhasil apabila memiliki sumber daya manusia berkualitas. Sehubungan dengan ini perlu diketahui gambaran partisipasi pendidikan pada setiap anak usia sekolah di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah maka Identifikasi Masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah gambaran sekolah satu atap, (2) Apakah Sekolah Satu Atap dapat memenuhi kebutuhan sekolah, (3) Pendapat masyarakat terhadap Sekolah Satu Atap. (4) berapa besar daya tampung sekolah satu atap (5) Bagaimanakah partisipasi pendidikan terhadap sekolah satu atap.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah gambaran sekolah satu atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban.
2. Bagaimanakah Persepsi masyarakat terhadap Sekolah Satu Atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban.
3. Bagaimanakah partisipasi pendidikan terhadap sekolah satu atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah gambaran sekolah satu atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban.
2. Bagaimanakah Persepsi masyarakat terhadap Sekolah Satu Atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban.

3. Bagaimanakah partisipasi pendidikan terhadap sekolah satu atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran sekolah satu atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban.
2. Untuk mengetahui Persepsi masyarakat terhadap Sekolah Satu Atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban.
3. Untuk mengetahui partisipasi pendidikan terhadap sekolah satu atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan S1 Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
2. Sebagai sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi dunia pendidikan
3. Untuk bahan acuan dalam penelitian selanjutnya, khususnya sakademisi yang melakukan penelitian tentang sekolah dua atap